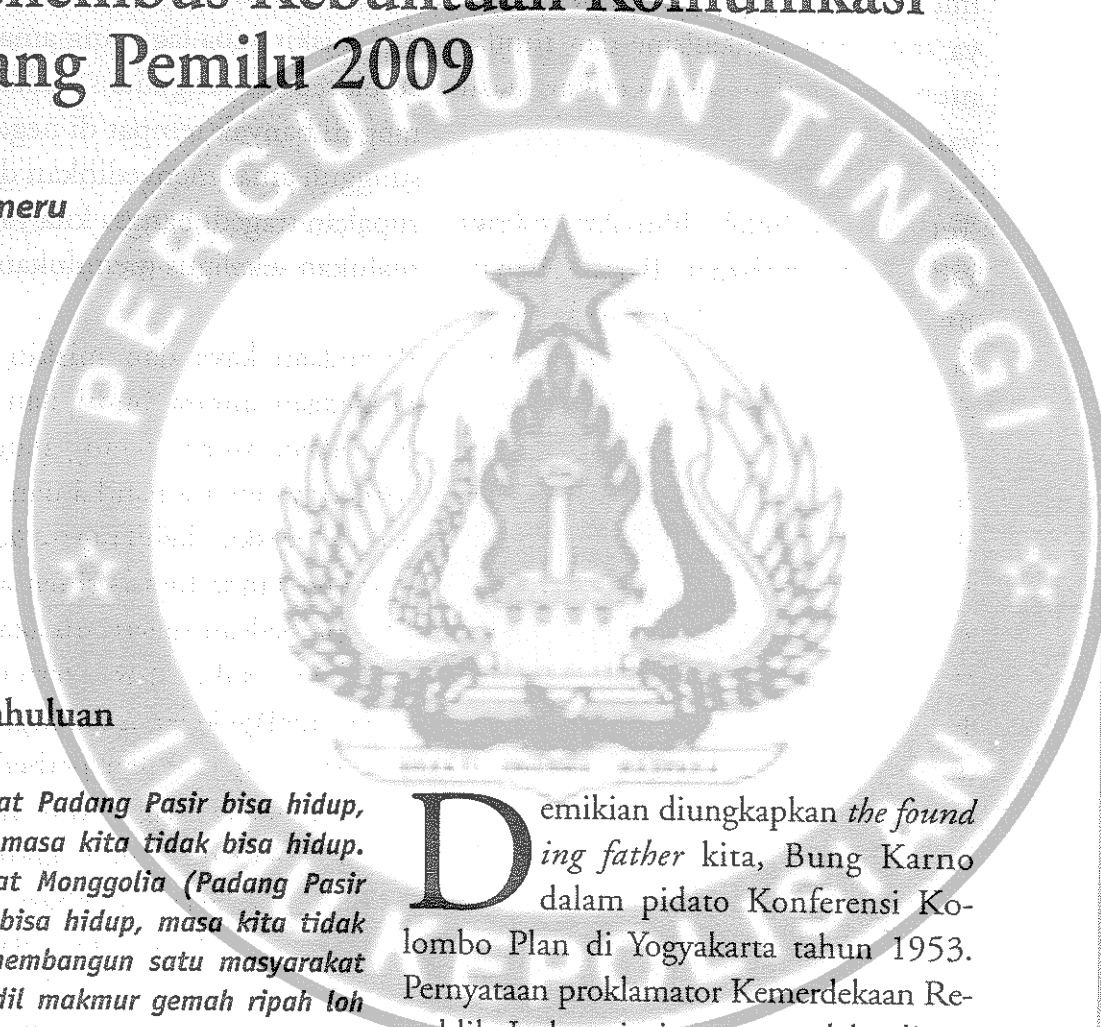


Tanggung Jawab Partai Politik Menembus Kebuntuan Komunikasi Jelang Pemilu 2009

Chusmeru



Pendahuluan

"Rakyat Padang Pasir bisa hidup, masa kita tidak bisa hidup. Rakyat Monggolia (Padang Pasir juga) bisa hidup, masa kita tidak bisa membangun satu masyarakat adil makmur gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja, dimana si Dullah cukup sandang, cukup pangan, dimana Sarinem cukup sandang, cukup pangan? Kalau kita tidak bisa menyelenggarakan sandang pangan di tanah air yang kaya ini, maka sesungguhnya kita sendiri yang tolol, kita sendiri yang maha tolol".

Demikian diungkapkan *the founding father* kita, Bung Karno dalam pidato Konferensi Kolombo Plan di Yogyakarta tahun 1953. Pernyataan proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia itu patut selalu diwacanakan untuk menggugah sejauh mana kepekaan dan kepedulian seluruh komponen bangsa ini menangkap makna di balik ungkapan itu.

Masalahnya, siapakah yang dianggap tolol oleh Bung Karno itu? Dalam konteks dan konstelasi sosial, politik, ekonomi

kekinian, mengapa ketololan itu masih saja terjadi? Boleh jadi yang tolol adalah elite politik, konglomerat, atau bahkan rakyat. Tetapi sekali lagi, mengapa?

Menyimak kasus “perseteruan” antara Presiden dan DPR RI, antara DPRD dan gubernur atau bupati di beberapa daerah menarik untuk dicermati. Kasus serupa juga terjadi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di beberapa daerah di Indonesia, termasuk pro kontra kemenangan Gubernur Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Kemenangan pasangan Ahmad Heryawan – Dede Yusuf dalam pilkada Jawa Barat juga telah memicu tindakan agresif kelompok pendukung pasangan lain. Akankah terjadi gonjang – ganjing serupa untuk pemilihan gubernur / bupati yang akan digelar di daerah lain?. Akankah pemilihan umum (pemilu) tahun 2009 juga diwarnai gejolak politik seperti halnya pilkada? Tampaknya ada persoalan komunikasi yang menarik untuk dikaji.

Distorsi Komunikasi

Pada tataran partai politik (parpol) sesungguhnya terjadi komunikasi

politik, baik secara vertikal – vertikal, vertikal – horisontal, maupun horisontal – horisontal. Hanya saja, komunikasi yang terjadi banyak mengalami distorsi, manipulasi, dan korupsi informasi yang menjurus pada kebuntuan dan stagnasi komunikasi. Hal ini terjadi karena komunikasi politik tidak dibangun dengan fondasi kepercayaan (*trust*), dukungan (*support*), dan keterbukaan (*open minded-ness*) antara elite politik dengan rakyat. Padahal ketiga fondasi itu sangat penting dalam rangka membangun komunikasi yang manusiawi, termasuk komunikasi politik dalam perspektif demokratis.

Pemilihan umum yang diharapkan mampu menjadi wahana demokratisasi mulai diwarnai bermacam kecurigaan dan perseteruan. Iklan politik Ketua Umum Partai Hanura Jenderal (Purn) Wiranto tentang kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di media massa telah melahirkan polemik dan pro kontra seputar etika komunikasi maupun etika politik. Jauh sebelumnya, pada pemilu 2004 Panglima TNI Jenderal Endiartono Sutarto waktu itu mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, bahwa ada upaya-upaya untuk menggagalkan pemilu

tahun 2004. Pertanyaan mendasar sesungguhnya bukan kepada siapa pihak yang ingin menggagalkan pemilu itu, tetapi justru kepada mengapa muncul indikasi semacam itu.

Komunikasi vertikal-vertikal yang berada pada level elite politik memang kerap diwarnai berbagai ketegangan akibat hilangnya rasa saling percaya diantara mereka. Kecurigaan, perebutan *personal interest*, dan manipulasi informasi politik membuat proses komunikasi di tingkat elite ibarat main petak umpet dan meninggalkan hati nurani. Sulit dibayangkan, bagaimana elite politik dapat mewujudkan masyarakat yang adil makmur gemah ripah loh jinawi. Jangankan wewujudkan masyarakat seperti itu, memikirkannya pun mereka tidak sempat, karena diantara mereka memperlakukan politik bukan sebagai kebijakan yang berangkat dari hati nurani, tetapi sebagai tontonan dan olah raga. Penuh dagelan, akting, saling tendang, sikut kiri, sikat kanan.

Komunikasi vertikal-horisontal juga mengalami disharmoni, lantaran komunikasi model otoritarian masih saja dipupuk dan disuburkan. Komunikasi penuh distorsi dan korupsi, lantaran informasi adalah sumber kekua-

saan bagi elite politik dan ekonomi. Banyak informasi yang disimpan, disembunyikan atau dikuasai sendiri oleh para elite, baik yang ada di birokrasi, industri, maupun partai politik. Beberapa kasus distorsi dan korupsi komunikasi dapat dijumpai.

Hampir sebagian besar masyarakat sepakat, bahwa abad sekarang adalah era teknologi informasi dan transparansi. Namun realitanya, masyarakat petani kesulitan untuk memperoleh informasi yang benar tentang harga maupun kelangkaan pupuk di tanah air. Masyarakat bahkan tidak pernah mendapat informasi yang lengkap dan terbuka tentang pemadaman listrik atau air di daerahnya. Masyarakat juga kurang memperoleh akses informasi yang lengkap tentang calon anggota legislatif atau calon kepala daerah, sampai kemudian terungkap fakta seorang calon anggota DPRD ternyata menggunakan ijasah palsu, atau calon bupati yang ternyata memiliki catatan kriminal.

Setiap hari masyarakat membaca koran, mendengar radio, dan menonton televisi. Tak henti-henti para elite berbicara tentang demokrasi dan ekonomi kerakyatan. Namun apa yang terjadi kemudian? Sederet kong-

lometer yang diduga bermasalah masih saja asyik bermain golf di tengah derita rakyat miskin yang bertambah jumlahnya akibat kenaikan BBM atau akibat bencana alam. Daftar panjang mantan pejabat dan anggota DPR / DPRD yang terlibat kasus korupsi menghiasi media massa. Rakyat bingung antara ucapan dan tindakan, antara kata dan makna, antara demokrasi dan demonstrasi. Seolah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila ini sudah kehilangan hati nurani.

Ketika komunikasi vertikal-vertikal dan komunikasi vertikal-horisontal mengalami distorsi, maka komunikasi horisontal-horisontal pun mengalami kebuntuan. Komunikasi politik horisontal bisa berubah sekejap menjadi mobilisasi massa. Hanya karena sentuhan isu yang belum jelas, rakyat yang semula penuh kesadaran dan kepasrahan seketika berubah menjadi massa yang beringas. Begitu pun karena iming-iming materi, sekelompok orang dapat digiring melakukan unjuk rasa untuk satu kepentingan politik dan ekonomi dengan kemasan rapi : Demokrasi !. Yang terjadi bukan pendidikan, pencerahan, ataupun pencerdasan politik rakyat oleh elite, tetapi justru

pemeliharaan premanisme politik. Persoalan rakyat tidak diselesaikan secara rasional, tetapi lewat baku hantam dan baku bunuh. Perbedaan pendapat tidak diselesaikan lewat dialog, tetapi dengan kelewang, golok, dan pedang.

Dalam situasi kebuntuan dan stagnasi komunikasi, lantas partisipasi politik seperti apa yang dapat diharapkan datang dari rakyat?. Pertanyaan tersebut memang terkesan pesimistik. Namun jika kita mau menengok beberapa agenda reformasi yang bergulir pada Mei 1998, pesimisme itu tampaknya wajar saja. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), meskipun sudah berjalan, namun hasilnya masih belum sesuai dengan harapan rakyat. Bahkan kejaksan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia tercoreng citranya oleh kasus suap yang dilakukan oknum kejaksan sendiri. Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan salah satu agenda reformasi tersebut belum didukung sepenuhnya oleh seluruh masyarakat. Kasus perseteruan antara KPK, group musik rock Slink dengan anggota DPR RI belum lama ini menunjukkan bahwa wakil rakyat sendiri ternyata masih belum

sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat pun belum berjalan sesuai harapan. Belum tampak adanya keberpihakan yang nyata terhadap golongan ekonomi lemah. Berbagai terobosan dilakukan untuk mendatangkan investasi di daerah, bahkan beberapa kabupaten telah menetapkan kebijakan pro-investasi. Sementara itu, para pengusaha dan pedagang kecil selalu diiming-imingi tawaran kredit. Alhasil, para pemilik modal besar yang biasanya lebih dekat dengan penguasa di daerah makin kokoh eksistensinya, sedangkan pengusaha dan pedagang kecil gulung tikar karena terlilit utang. Belum lagi peraturan daerah (Perda) yang dibuat mengancam kehidupan rakyat kecil, karena lahan penghidupan mereka setiap saat siap digusur untuk kepentingan sebuah hotel, restoran, mall, atau *hypermarket*. Belum tampak keberpihakan kepada si Dullah dan si Sarinem, seperti pesan Bung Karno itu.

Kebijakan Pro-Rakyat

Kebijakan, baik di sektor politik

maupun ekonomi selayaknya berangkat dari aspirasi masyarakat, bukan semata inisiasi penguasa. Ada proses *input* dan *output* sebelum sebuah kebijakan, baik Perda maupun SK Bupati atau Gubernur dibuat. Namun lantaran masih saja muncul perseteruan antara legislatif dan eksekutif, maka yang muncul adalah sebuah produk politik yang tidak jelas arahnya, dan cenderung tidak berpihak kepada rakyat. Ada beberapa implikasi terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat tersebut.

Pertama, rakyat akan bersikap apatis terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Partisipasi politik rakyat sulit diharapkan. Bahkan akan muncul krisis kepercayaan, baik kepada eksekutif maupun legislatif. Kalaupun terjadi unjuk rasa kepada kedua lembaga itu, bukan semata keinginan untuk menyampaikan aspirasinya, tetapi juga ketidakpercayaan rakyat terhadap wakil-wakilnya di DPRD maupun kepada pemimpinnya.

Kedua, sikap defensif masyarakat terhadap berbagai terobosan yang ditawarkan pemerintah. Mekanisme pertahanan masyarakat itu bisa dalam bentuk tak acuh sampai kepada

bentuk perlawanan atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak. Tentu saja sikap defensif itu terbangun atas pengalaman masa lalu, bahwa rakyat senantiasa menjadi objek kepentingan politik dan ekonomi para elite.

Ketiga, hilangnya kesadaran dan kesabaran rakyat untuk menunggu janji-janji manis elite politik ketika kampanye menjelang pemilu atau pilkada. Rakyat ingin segala tuntutan mereka dapat terpenuhi secara instan. Keadaan seperti itu dapat mengakibatkan terjadinya frustrasi sosial, karena segala keluhan dan tuntutan rakyat atas perbaikan nasib mereka selalu dijawab dengan alasan klasik : “ *Akan kami tampung* ” atau “ *Akan kami tindak lanjuti* ”.

Potensi Golput

Sukses kepala negara melalui pemilu atau kepala daerah melalui pilkada kerap dianggap sebagai barometer proses demokrasi di tanah air. Gubernur, bupati, dan walikota yang memenangi pilkada lantas menjadi pemimpin yang dipandang *legitimate*. Oleh karena kepala daerah terpilih secara demokratis, setiap kebijakan

yang dibuat dianggap sebagai produk yang demokratis dan *legitimate* pula. Siapa pun, entah mencoblos dalam pilkada ataukah golput mesti tunduk kepada kebijakan pemimpin yang memenangi pilkada tersebut.

Begitulah demokrasi dimanaknai. Partisipasi politik rakyat pada saat pilkada begitu dinanti. Golput dicerca sebagian orang, dicibir, “dikutuk”, dan “diharamkan” dalam pilkada. Karenanya, “kemenangan” golput pada beberapa pilkada di Indonesia menimbulkan sederet pertanyaan. Adakah yang salah dalam proses suksesi kepala daerah yang untuk saat ini dianggap paling demokratis? Benarkah golput lahir karena apatisisme rakyat terhadap semua kandidat kepala daerah maupun partai politik yang mengusung calon kepala daerah? Kasus aktual golput terjadi dalam pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara. Jumlah golput di Sumatera Utara bahkan melebihi jumlah suara yang diperoleh pemenang. Sedangkan golput di Jawa Barat menduduki peringkat kedua setelah pasangan terpilih Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf.

Terminologi dan realitas golput bukan lagi barang baru di Indonesia.

Paling tidak dalam dasawarsa terakhir atau dua kali penyelenggaraan pemilu angka golput cukup menggairahkan. Utamanya jika dibandingkan dengan pemilu – pemilu pada saat Presiden Soeharto berkuasa. Praktik golput pun mulai bervariasi; mulai dari tidak mendarangi tempat pemungutan suara (TPS), mencoblos semua tanda gambar, sampai merusak kertas suara. Realitas golput ini mencerminkan dua hal.

Pertama, bangkitnya kesadaran politik rakyat. Pemilu dan pilkada dianggap bukan lagi sesuatu yang sakral dan mesti dipatuhi sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya.. Golput saat ini dipandang sebagai bentuk perlawanan rakyat atas penguasa, partai politik, kebijakan, dan simbol-simbol kekuasaan yang dianggap tiranik. Golput muncul bukan karena alasan yang emosional, tetapi atas pertimbangan rasional rakyat, bahwa apa pun pilihan dalam pemilu atau pilkada tidak akan mengubah keadaan. Di satu sisi rakyat tunduk pada kebijakan yang dibuat pemimpin dan di lain sisi tidak sedikit pemimpin yang *mencla-mencle* atau munafik dalam menjalankan kebijakannya. Di satu waktu para pemimpin bicara keprihatinan atas derita dan kemis-

kinan rakyat, di lain waktu mereka tidak segan korupsi dan menumpuk kekayaan.

Kedua, golput boleh jadi merupakan produk demokrasi modern sekaligus koreksi atas kegagalan demokrasi itu sendiri. Jauh sebelumnya, Carol C. Gold menawarkan agar demokrasi ditinjau kembali. Golput menjadi salah satu indikator perlunya *rethinking democracy* tersebut. Pemilu dan pilkada yang sering dianggap sebagai tonggak demokrasi gagal menjalankan perannya, karena tidak menghasilkan pemimpin yang diharapkan rakyat banyak. Partai politik yang diharapkan mampu membawa perubahan dalam kehidupan rakyat justru kerap kali dilanda konflik internal.

Sebagai sistem, demokrasi dalam contoh kasus pilkada hanya mampu menggalang dan memobilisasi rakyat untuk mencoblos di TPS. Partisipasi politik rakyat sebagai syarat demokrasi tidak bejalan kontinyu dan aktual. Setelah pilkada usai, partisipasi politik rakyat pun tuntas sudah. Rakyat jarang dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kepala daerah sebagai eksekutif ber-

sikukuh dengan kebijakan yang dibuat, meski rakyat melakukan penolakan. Sementara DPRD sebagai representasi rakyat di daerah kerap bersekongkol dengan eksekutif untuk memuluskan proyek-proyek yang elitis dan kapitalistik. Meski golput lahir atas kesadaran politik rakyat, namun keberadaannya cukup dilematis. Golput dicerca dan dicaci. Golput diburu dan dibujuk untuk tunduk. Golput ibarat virus penyakit, ditakuti partai politik dan semua kandidat kepala daerah..

Komunikasi Politik Gagal

Golput selayaknya tidak dianggap seperti virus penyakit yang berbahaya. Pemilu dan pilkada adalah kegiatan politik yang sarat probabilitas, tidak eksak. Pemilu dan pilkada juga merupakan bentuk komunikasi politik. Keberhasilan seseorang dalam pertarungan pemilu dan pilkada akan ditentukan oleh komponen dan strategi komunikasi politiknya. Golput hadir sebagai umpan balik (*feedback*) terhadap penampilan dan kinerja partai politik dan kandidat. Oleh karenanya, golput mesti diposisikan sebagai masukan (*input*) untuk proses komunikasi politik berikutnya.

Semakin tinggi angka golput dalam pemilu atau pilkada suatu daerah, semakin besar kemungkinan adanya kesalahan strategi komunikasi politik kandidat.

Mereka yang mengambil sikap golput tentu saja tidak mau terjebak dalam rivalitas kandidat presiden atau kepala daerah. Kerangka pemikiran (*frame of reference*) dan lingkup pengalaman (*field of experience*) golput tidak diperoleh lewat teks atau teori politik. Golput terbentuk oleh pengalaman masa lalu, yaitu pemilu dan pilkada-pilkada sebelumnya. Janji gombal kandidat yang tidak pernah terwujud, kehidupan sosial ekonomi yang tetap mandek, serta manipulasi empati kandidat mendorong rakyat mengambil keputusan golput.

Kegagalan komunikasi politik dalam pilkada bisa berawal dari pemilihan media kampanye yang digunakan. Televisi saat ini menjadi media kampanye favorit bagi beberapa kandidat. Televisi memang bersifat masal, serentak, visual, dan memiliki *attention getter* bagi khalayak. Meski demikian, dalam beberapa kasus televisi hanya efektif untuk mengenalkan figur kandidat. Buat sebagian besar rakyat, televisi tetap saja seba-

gai media elitis, media yang hanya bisa digunakan dan menguntungkan para elite. Penampilan kandidat di televisi sama sekali tidak menggoyahkan sikap golput. Apalagi jika janji-janji kampanye lewat televisi dipandang sebagai tontonan belaka, yang akan tergantikan oleh iklan produk, gosip selebritis, dan sinetron.

Pencitraan partai politik atau kandidat lewat televisi justru menimbulkan efek bumerang, yaitu memperteguh sikap seseorang untuk tetap golput. Rakyat mulai sadar, bahwa penampilan pimpinan partai atau kandidat kepala daerah di televisi bukan benar-benar untuk menyampaikan visi misinya. Tampilan kandidat kepala daerah itu lebih sebagai proyek pencitraan (*imaging project*). Dalam kondisi media dan kandidat yang seperti itu, apakah golput masih tetap harus disalahkan dan dicerca?

Penutup

Menghadapi kondisi kebuntuan komunikasi dan partisipasi politik itu tidak ada pilihan lain kecuali melakukan perubahan pada tataran moral dan perilaku politik. Peran dan tanggung jawab ini sesungguhnya lebih

berada pada partai politik yang memiliki perangkat untuk melakukan artikulasi dan mengakomodasikan kepentingan rakyat sebagai konstituentennya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 7 Juli 2008 telah mengumumkan 34 partai politik yang lolos verifikasi faktual. Artinya, partai-partai tersebut sudah siap untuk bertarung dalam pemilu tahun 2009 nanti.

Menjelang pemilu 2009 sesungguhnya merupakan momentum yang strategis bagi partai politik untuk mengantisipasi kebuntuan komunikasi politik dengan lebih banyak menawarkan program dan kerja kongkret yang lebih bersifat *problem solving*. Hanya sayang, partai politik peserta pemilu biasanya justru disibukkan dengan urusan penetapan calon legislatif (caleg) dan konflik internal partai; yang dalam beberapa kasus makin menambah kebuntuan komunikasi politik.

Kalaupun partai politik merasa menanggung beban berat dalam menuntaskan dan mewujudkan agenda reformasi, maka sesungguhnya mereka dapat melakukan sinergi lintas komponen. Sinergi dalam rangka perubahan untuk keluar dari situasi

stagnasi itu ialah, parpol harus siap bekerja sama dengan kelompok-kelompok independen yang tidak berorientasi kekuasaan, tetapi punya keberpihakan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Misalnya, sinergi dengan perguruan tinggi dalam pendidikan dan pelatihan calon pimpinan partai, atau program pemberdayaan masyarakat bersinergi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Sudah saatnya pendirian partai politik dilandasi oleh itikad untuk meningkatkan harkat hidup rakyat se-

cara luas. Bukan sekadar euphoria politik menjelang pemilu; setelah tidak meraih suara secara signifikan dalam pemilu lantas bubar tanpa ada pertanggungjawaban kepada rakyat. Tanggung jawab sosial dan moral partai politik amat penting menjelang pemilu. Tanpa tanggung jawab partai politik, rakyat akan selalu mencari saluran komunikasi dan cara sendiri untuk memperjuangkan nasibnya. Itu artinya, bangsa dan negara ini akan menghadapi bencana politik yang menyita banyak energi dan korban. □

Daftar Bacaan:

Gould, Carol C. 1993. *Demokrasi Ditinjau Kembali*. (Terjemahan). Penerbit PT Tiara Wacana : Yogya

Stone, Borden, 1976. *Human Communication, The Process of Relating*. Cummings Publishing Company : California.